BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer dan data sekunder. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang telah disebarkan kepada 30 orang petugas pajak seksi ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung sebagai responden dan sampel dalam penelitian ini.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon".

Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "Oor Logs-Overgangs Blasting" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "Deinspetie van Vinancian", yang kemudian diganti dengan nama "Zeinenbu" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok Coorporative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok Non-Coorporative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor

baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

   a. Politik

      Mendukung Demokrasi Bangsa

   b. Kelembagaan

      Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

   c. Fiskal

      Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

   d. Ekonomi

      Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib

Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
    a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
    b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
    c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
    d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan kepegawaian,
    b. Melakukan urusan Keuangan,
    c. Melakukan urusan tata usaha,
    d. Melakukan urusan rumah tangga.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
    b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,

c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
   b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
   c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan urusan penetapan,
   b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
   c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
   b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
   c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
   b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
   c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta

d. Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
   b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
   c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
   d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka

pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Untuk variabel X dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu petugas seksi ekstensifikasi. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	26	86.67%
Perempuan	4	13.33%
Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 26 orang atau sebesar 86.67% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang atau sebesar 13.33%.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
<30 Tahun	3	10.00%
31-40 Tahun	20	66.67%
41-50 Tahun	7	23.33%
>50 Tahun	0	0%
Jumlah	30	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 10,00%, 31-40 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 66,67%, 41-50 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 23,33%, Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	1	3.33%

Diploma III	23	76.67%
Strata I (S1)	6	20.00%
Strata II (S2)	0	0%
Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 1 orang atau sebesar 3,33%, Diploma III (D3) sebanyak 23 orang atau sebesar 76,67% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 6 orang atau sebesar 20,00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Diploma III (D3).

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	1	3.33%
1– 5 Tahun	12	40.00%
5 – 10 Tahun	14	46.67%
>10 Tahun	3	10.00%
Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 3.33%, responden dengan lama kerja 1–5 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 40.00% dan responden dengan lama kerja 5–10 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 46.67%, dan responden dengan lama kerja

lebih dari 10 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 10.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak 5-10 tahun.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Kualitatif (Metode Deskriptif)

4.2.1.1 Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 30 orang petugas seksi ekstensifikasi pada KPP di wilayah Kota Bandung. Analisis kualitatif (metode deskriptif) diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel penerapan sistem manajemen informasi objek pajak. Untuk mendapatkan gambaran penerapan sistem manajemen informasi objek pajak di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penerapan Sistem Manajemen Objek Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pendaftaran Subjek dan Objek Pajak	130	300	43,33	Kurang
2	Pendataan	316	450	70,22	Baik
3	Penilaian	110	150	73,33	Baik
4	Pemberian Identitas Objek Pajak	117	150	78	Baik
5	Perekaman Data	111	150	74	Baik
6	Pemeliharaan Basis Data	215	300	71.67	Baik
7	Pencetakan Hasil Keluaran	118	150	78,67	Baik
8	Pemantauan Penerimaan	121	150	80,67	Baik
9	Pelayanan	110	150	73,33	Baik
10	Penagihan	111	150	74	Baik
	Total	1.429	2.100	68,04	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan sistem manajemen informasi objek pajak pada KPP Pratama di wilayah kota Bandung dapat dikatakan sudah baik. Namun jika dilihat dari segi kegiatan pendaftaran subjek dan objek pajak yang dilakukan KPP Pratama di wilayah Kota Bandung pada umumnya belum sepenuhnya memenuhi kriteria. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai penerapan sistem manajemen informasi objek pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Pendaftaran Subjek dan Objek Pajak

Indikator pendaftaran subjek dan objek pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pendaftaran Subjek dan Objek Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Apakah SPOP yang diisi oleh WP sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?	f	8	11	11	0	0	63
		%	26,6	36,6	36,6	0	0	99,8
2	Apakah semua WP sudah mengisi SPOP dengan benar?	f	5	13	12	0	0	67
		%	16,7	43,3	40	0	0	100
	Total	f	13	24	23	0	0	130
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 43,3%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{130}{2x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{130}{300} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 43{,}33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 43,33%, bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori kurang baik. Hasil tanggapan responden dalam hal kesesuaian data yang diisi oleh WP pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung pada umumnya hanya sebagian wajib pajak yang mengisi formulir SPOP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebesar 36,6%. Sedangkan yang mengisi formulir tidak sesuai karena ketidaksengajaan yaitu sebesar 36,6% dan tidak sesuai dengan maksud mengambil keuntungan pribadi sebesar 26,6%.

Selanjutnya hasil kuesioner mengenai pengisian SPOP oleh Wajib Pajak, tanggapan responden sebesar 43,3% menyatakan bahwa masih sangat banyak wajib pajak yang tidak mengisi SPOP dengan benar, 40% lagi menyatakan bahwa hanya sedikit wajib pajak yang mengisi SPOP dengan benar dan 16,7 % menyatakan sangat banyak wajib pajak yang belum mengisi SPOP dengan benar.

Berdasarkan hasil skoring diatas, masalah yang selama ini terjadi yaitu masih banyak wajib pajak yang belum mengisi SPOP dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya memang terjadi karena sebagian besar responden berpendapat bahwa sebagian besar wajib pajak yang belum mengisi SPOP dengan benar. Hal ini sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini salah satunya

yang diukur dengan indikator ini adalah mengenai kurang adanya kerja sama wajib pajak dengan petugas dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Pemberitahuan Objek Pajak (LPOP). Kurang kerjasama disini dapat diakomodir dengan tidak benarnya pengisian SPOP oleh Wajib Pajak dibuktikan dengan hasil kuesioner yang total menunjukkan skor kurang baik.

2. Pendataan

Pendataan merupakan indikator dari penerapan sistem manajemen informasi objek pajak. Indikator pendataan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pendataan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Cara pendataan subjek dan objek pajak	**F**	6	11	13	0	0	67
		%	20	36,7	43,3	0	0	100
5	Apakah selalu dilakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan pendataan?	**F**	0	0	5	16	9	124
		%	0	0	16,7	53,3	30	100
6	Apakah petugas mengalami kesulitan dalam mengakses data objek pajak yang dimiliki WP di KPP lain?	**F**	0	0	7	11	12	125
		%	0	0	23,3	36,7	40	100
Total		F	6	11	25	27	21	316
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 70,22%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{316}{3x5x30} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{316}{450} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 70{,}22\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 70,22%, bila merujuk pada tabel 4.7 termasuk dalam kategori baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa cara pendataan subjek dan objek pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dilakukan apabila wilayah tersebut sudah mempunyai data administrasi PBB sebesar 43.3%, 36.7% responden berpendapat pendataan subjek dan objek pajak dilakukan hanya berdasarkan formulir SPOP, dan 20% responden berpendapat langsung saja dilakukan pendataan.

Kemudian, hasil tanggapan responden mengenai pembagian tugas dalam pelakasnaan pendataan paling banyak responden berpendapat bahwa sering dilakukan pembagian tugas pada saat pendataan dilakukan yaitu sebesar 53.3 %, 30% responden berpendapat selalu dilakukan pembagian tugas dan 16.7% responden berpendapat jarang sekali dilakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan pendataan.

Hal tersebut berhubungan dengan kualitas data yang ada pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung baik itu data internal maupun eksternal. Petugas mengalami kesulitan dalam mengakses data objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak di KPP lain karena 40% responden berpendapat mereka selalu mengalami kesulitan dalam mengakses data objek pajak di KPP lain, 36,7 % berpendapat sering dan 23,37 % menjawab jarang sekali.

Berdasarkan hasil skoring diatas, masalah yang selama ini terjadi yaitu sistem manajemen informasi objek pajak belum online secara nasional memang terjadi karena responden sebagian besar menjawab bahwa petugas mengalami kesulitan dalam mengakses data objek pajak yang dimiliki wajib pajak di KPP lain.

3. Penilaian

Indikator penilaian diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penilaian

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
6	Pentingnya DBKB dalam proses penilaian	F	0	0	11	18	1	110
		%	0	0	36,7	60	3,3	100
Total		F	0	0	11	18	1	110
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 73,33 %								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{110}{1x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{110}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 73{,}3\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 73.3%, bila merujuk pada tabel 4.8 termasuk dalam kategori sudah baik. Hasil tanggapan responden mengenai pentingnya DBKB dalam proses penilaian menunjukkan bahwa paling banyak

responden berpendapat bahwa DBKB digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian yaitu sebesar 60%, kemudian 36.7% responden berpendapat DBKB hanya sekedar data pembanding, dan 3.3% responden berpendapat bahwa DBKB tidak perlu. Berdasarkan hasil tanggapan responden ini maka DBKB merupakan alat bantu penting yang digunakan dalam penilaian di sistem ini.

4. Pemberian Identitas Objek Pajak

Indikator pemberian identitas objek pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Identitas Objek Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Pentingnya pemberian NOP	F	0	1	7	16	6	117
		%	0	3,3	23,3	53,3	20	81,9
Total		F	0	1	7	16	6	117
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 78%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{117}{1x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{117}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 78%, bila merujuk pada tabel 4.9 termasuk dalam kategori sudah baik. Hasil tanggapan responden mengenai

pentingnya pemberian identitas objek pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa pemberian identitas objek pajak merupakan bagian dari tugas pegawai yaitu sebesar 53.3%, kemudian 23.3% responden berpendapat pemberian identitas objek pajak dilakukan apabila diminta atasan, 20% responden berpendapat bahwa pemberian identitas objek pajak dilakukan agar identitas objek pajak setiap wajib pajak tidak sama, dan 3.3% responden berpendapat pemberian identitas objek pajak hanya sekedar peraturan saja.

5. Perekaman Data

Perekaman data merupakan indikator dari penerapan sistem manajemen informasi objek pajak. Indikator perekaman data diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Perekaman Data

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Pentingnya pembuatan jadwal penugasan operator *data entry* dalam proses perekaman data	**F**	0	0	10	19	1	111
		%	0	0	33.3	63.3	3.3	99.9
	Total	**F**	0	0	10	19	1	111
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 74%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{111}{1x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{111}{150} \times 100\%$$

% skor tanggapan responden = 74%

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 74%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori sudah baik. Hasil tanggapan responden mengenai pentingnya pembuatan jadwal penugasan operator *data entry* dalam proses perekaman data menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa pembuatan jadwal penugasan operator *data entry* merupakan bagian dari tugas pegawai yaitu sebesar 63.3%, kemudian 33.3% responden berpendapat pembuatan jadwal penugasan dilakukan apabila diminta atasan, dan 3.3% responden berpendapat bahwa pembuatan jadwal penugasan operator *data entry* merupakan standar perekaman data.

6. Pemeliharaan Basis Data

Indikator pemeliharaan basis data diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemeliharaan Basis Data

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
9	Membuat rencana kerja sebelum pemeliharaan basis data dilakukan	F	0	0	4	21	5	121
		%	0	0	13.3	70	16.7	100
10	Cara pemeliharaan basis data	F	0	6	14	10	0	94
		%	0	20	46.7	33.3	0	100
Total		F	0	6	18	31	5	215
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 71.67 %								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{215}{2x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{215}{300} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 71.67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 71.67%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa petugas membuat daftar perubahan data subjek dan objek pajak sebesar 46.6%, kemudian 33.3% responden berpendapat bahwa pemeliharaan basis data dilakukan hanya melihat sket lokasi bidang objek pajak yang mengalami perubahan, dan 20% responden berpendapat pemeliharaan basis data dilakukan hanya dengan menghimpun data perubahan subjek dan objek pajak dari wajib pajak.

Hal ini berkaitan dengan pembuatan rencana kerja sebelum pemeliharaan basis data dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa sebelum atasan meminta, rencana kerja sudah dibuat yaitu sebesar 70%, 16.7% responden berpendapat bahwa pembuatan rencana kerja sebelum pemeliharaan basis data merupakan standar proses pemeliharaan basis data, 13.3% responden berpendapat bahwa pembuatan rencana kerja dilakukan apabila diperintah oleh atasan.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai ketidakakuratan data tentang subjek dan objek pajak akan muncul. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah ketidakakuratan data mengenai subyek dan obyek pajak, yaitu masih ada responden yang menanggapi bahwa kegiatan pemeliharaan basis data bukan kepada prosedur kerja yang baik melainkan kepada perintah atasan. Selain itu responden berpendapat kegiatan pemeliharaan basis data tidak berdasarkan pada prosedur kerja yang semestinya, tetapi kepada kondisi lokasi obyek pajak dan penghimpunan data karena perubahan data semata.

7. Pencetakan SPPT dan STTS

Indikator pencetakan SPPT dan STTS diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pencetakan SPPT dan STTS

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
11	Pentingnya pencetakan SPPT dan STTS	F	0	0	8	13	9	121
		%	0	0	26,7	43.3	30	100
Total		F	0	0	8	13	9	121
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 80.67%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{121}{1x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{121}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.67\%$$

Presentase total skor tanggapan responden sebesar 80.67%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori sudah baik. Hasil tanggapan responden mengenai pentingnya pencetakan SPPT dan STTS menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa pencetakan SPPT dan STTS merupakan bagian dari tugas pegawai yaitu sebesar 43.3%, kemudian 30% responden berpendapat pencetakan SPPT dan STTS merupakan dasar penetapan pajak terutang dan bukti pembayaran, 26.7% responden berpendapat bahwa pencetakan SPPT dan STTS dilakukan apabila diminta atasan.

Jika kita telaah lebih dalam mengenai jawaban atas tanggapan responden mengenai pentingnya pencetakan SPPT dan STTS sebagian besar dinyatakan sebagai tugas pegawai, juga tambahan tanggapan dari responden mengenai menunggu instruksi dari atasan terlebih dahulu baru melakukan pencatatan maka kita dapat sedikit menyimpulkan sementara bahwa sebenarnya pencetakan ini menurut tanggapan responden bukan hal yang penting, tetapi lebih kepada rutinitas dan prosedur pekerjaan semata. Tapi jika kita mengambil sudut pandang bahwa pentingnya pekerjaan didasarkan pada prosedur kerja maka pencetakan SPPT dan STTS merupakan suatu hal yang dianggap penting karena memenuhi prosedur kerja

yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan sebelumnya oleh suatu institusi dalam hal ini KPP Pratama.

8. Pemantauan Penerimaan

Indikator pemantauan penerimaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 13
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemantauan Penerimaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
11	Pentingnya pemantauan penerimaan	F	0	0	6	17	7	121
		%	0	0	20	56.7	23.3	100
Total		F	0	0	6	17	7	121
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 80.67%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{121}{1x5x30} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{121}{150} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 80.67%, bila merujuk pada tabel 4.13 termasuk dalam kategori sudah baik. Hasil tanggapan responden mengenai pentingnya pemantauan penerimaan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa pemantauan penerimaan merupakan bagian dari tugas pegawai yaitu sebesar 56.7%, kemudian 23.3% responden berpendapat pemantauan

penerimaan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak yang masuk, 20% responden berpendapat bahwa pemantauan penerimaan dilakukan apabila diminta atasan. Secara garis besar dapat sementara ini disimpulkan sama dengan indikator sebelumnya bahwa pekerjaan pemantauan mengenai penerimaan ini sebagian besar tanggapan responden menyatakan hal tersebut merupakan tugas bagi pegawai yang harus dikerjakan sesuai dengan prosedur pekerjaan.

9. Pelayanan

Indikator pelayanan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
13	Apabila ada wajib pajak yang complain mengenai pajak terutangnya	F	0	0	11	18	1	110
		%	0	0	36.7	60	3.3	100
Total		F	0	0	11	18	1	110
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 73.33%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{110}{1x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{110}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 73.33\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 73.33%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori sudah cukup baik. Hasil tanggapan responden mengenai pentingnya pelayanan terhadap wajib pajak yang complian mengenai pajak terutangnya menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa pelayanan terhadap wajib pajak yang complain maka petugas akan memberikan penjelasan sesuai dengan permasalahan yaitu sebesar 60%, kemudian 36.7% responden berpendapat petugas akan memberikan penjelasan apabila diminta atasan, dan 3.3% responden berpendapat itu merupakan standar pelayanan dalam perpajakan. Disini jelas bahwa petugas pajak telah melaksanakan misi KPP modern yang mengedepankan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Sehingga segala keluhan wajib pajak dapat diselesaikan dengan baik.

10. Penagihan

Indikator penagihan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penagihan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
14	Dasar penagihan	F	0	0	10	19	1	111
		%	0	0	33.3	63.3	3.3	99.9
Total		F	0	0	10	19	1	111
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 74%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{111}{1x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{111}{150} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 74\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 74%, bila merujuk pada tabel 4.15 termasuk dalam kategori sudah baik. Hasil tanggapan responden mengenai dasar penagihan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa dasar penagihan dilihat dari tanggal diterbitkannya SPPT dan tanggal jatuh tempo yaitu sebesar 63.3%, kemudian 33.3% responden berpendapat dasar penagihan hanya berdasarkan tanggal jatuh tempo, dan 3.3% responden berpendapat dasar penagihan dilihat dari batas waktu pelunasan SKP.

4.1.2.2 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya dibagi anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

Tabel 4.16
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung

No	KPP	Target Penerimaan PBB Tahun 2010	Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2010	%
1.	KPP Bojonagara	Rp 80.778.748.910	Rp 64.695.700.000	80,09
2.	KPP Cicadas	Rp 40.168.346.625	Rp 31.140.400.000	77,49
3.	KPP Karees	Rp 52.278.805.931	Rp 39.491.410.000	75,54
4.	KPP Cibeuying	Rp 62.168.438.787	Rp 49.815.570.000	80,13
5.	KPP Tegallega	Rp 30.466.487.009	Rp 22.045.550.000	72,36
Total		Rp 265.878.827.262	Rp 207.188.830.000	77,92

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi diperoleh kantor pelayanan pajak Bandung Bojonagara yaitu sebesar Rp 64.695.700.000 dengan pencapaian target sebesar 80,09%. Sebaliknya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan paling rendah diperoleh kantor pelayanan pajak Bandung Tegallega yaitu sebesar Rp 22.045.550.000 dengan pencapaian target hanya 72,36%.

4.1.3 Analisis Kuantitatif Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pada sub bab ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab I adalah adanya pengaruh dari penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta = 0$ Penerapan sistem manajemen informasi objek pajak (variabel independent (X)) tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (variabel dependent (Y)) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung

Ha: $\beta \neq 0$ Penerapan sistem manajemen informasi objek pajak (variabel independent (X)) memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (variabel dependent (Y)) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,182) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Data variabel independent (X) (penerapan sistem manajemen informasi objek pajak) dan variabel dependent (Y) (penerimaan pajak bumi dan bangunan) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Rekap Data Variabel Penerapan sistem manajemen informasi objek pajak (independent (X) dan Variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (dependent (Y))

No	X	Y	X2	Y2	XY
1	2,410881	8009	5,8123472	64144081	19308,75
2	2,346302	7749	5,5051331	60047001	18181,49
3	2,303388	7554	5,3055963	57062916	17399,79
4	2,460742	8013	6,0552512	64208169	19717,93
5	2,30569	7236	5,3162064	52359696	16683,97
∑	**11,827003**	**38561**	**27,994534**	**297821863**	**91291,93**

4.1.3.1 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu antara variabel independent (X), penerapan sistem manajemen informasi objek pajak yang diduga memiliki hubungan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependent (Y). Korelasi antara penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap penerimaan

pajak bumi dan bangunan dihitung menggunakan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$= \frac{(5 \text{ x } 91291{,}93) - (11{,}827003 \text{ x } 38561)}{\sqrt{[(5 \text{ x } 27{,}994534 - (11{,}827003)\ ) \text{ x })(5 \text{ x } 297821863) - (38561)\ )]}}$$

$$= \frac{\quad,\quad}{\sqrt{\quad\quad,\quad}} = \frac{\quad,\quad}{\quad,\quad} = 0{,}882$$

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 14 for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y) pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18
Korelasi Antara Variabel Independent (X) dengan Variabel Dependent (Y)

Correlations

		Y	X
Pearson Correlation	Y	1,000	,882
	X	,882	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,024
	X	,024	.
N	Y	5	5
	X	5	5

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel penerapan sistem manajemen infromasi objek pajak dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah

0,882. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/sangat kuat antara penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan tanda positif pada angka 0.882, artinya semakin baik penerapan sistem manajemen informasi objek pajak akan membuat penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem manajemen informasi objek pajak akan membuat penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin menurun.

Selain itu, tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0.024 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka korelasi antara penerapan sistem manajemen informasi dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung adalah signifikan.

4.1.3.2 Analisis Regressi

Selanjutnya untuk menguji pengaruh penerapan sistem manajemen informasi objek pajak (X) terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.17, maka dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut:

Konstanta (a)

$$a = \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$= \frac{(\quad,\qquad)\ (\qquad)\ (\quad,\qquad)\ (\qquad,\quad)}{(\qquad,\qquad)\ (\quad,\qquad)} = -2246,926$$

Koefisien regressi variabel X (b)

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{(\qquad,\quad)-(\quad,\qquad)\ (\qquad)}{(\qquad,\qquad)\ (\quad,\qquad)} = 4210,334$$

Dengan menggunakan *software SPSS 14 for windows*, maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 19
Hasil Regresi

Coefficients [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2246,926	3077,319		-,730	,518
	X	4210,334	1300,531	,882	3,237	,048

a. Dependent Variable: Y

Dimana : Y = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

X = Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

Nilai konstanta (a) sebesar -2246,926 menunjukkan nilai jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung apabila tidak dilakukan penerapan sistem manajemen informasi objek pajak. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 4210,334 menunjukkan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung apabila dilakukan penerapan sistem manajemen informasi objek pajak ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik penerapan sistem manajemen informasi objek pajak akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem manajemen informasi objek pajak akan menurunkan penerimaan pajak bumi dan bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

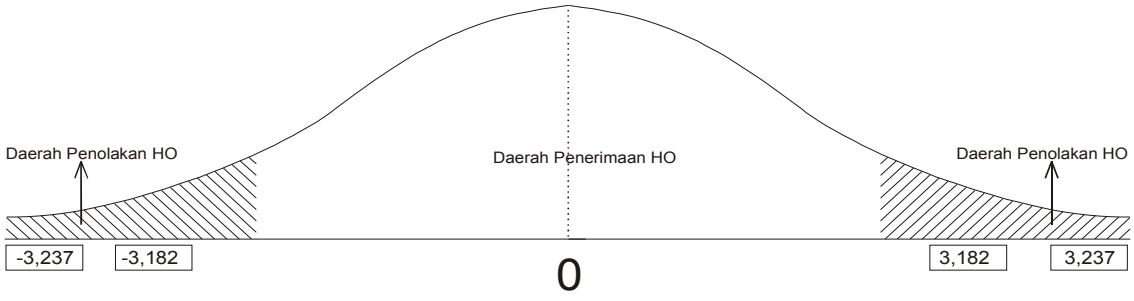
4.1.3.3 Uji Signifikansi

Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel di atas, akan dilakukan uji t untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen. Persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah benar-benar valid untuk memprediksi variabel dependen. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah penerapan sistem manajemen informai objek pajak benar-benar bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-\left(r_{xy}\right)^2}} = 0{,}882 \text{ x } \frac{\overline{\qquad\qquad}}{(\ ,\ \ )} = 3{,}237$$

Melalui hasi perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,237, sementara pada tabel t dengan derajat tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (5-2) = 3 diperoleh nilai t tabel sebesar 3,182. Karena t_{hitung} (3,237) besar dari t_{tabel} (3,182), maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh penerapan sistem manajemen informasi objek pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Oleh karena itu, terbukti bahwa hasil pengujian adalah signifikan atau dengan kata lain penerapan sistem manajemen informasi objek pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.



Gambar 4.21
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

4.1.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R-square*) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software SPSS 14 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.20
Koefisien Determinasi

Model Summary [b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,882[a]	,777	,703	1,78955

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *R-square* adalah sebesar 0,777 nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

$KD = (r_{xy})^2 \times 100\% = 77{,}7\%$

Koefisien determinasi sebesar 77,7% menunjukkan bahwa 77,7% perubahan pada penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh penerapan sistem manajemen informasi objek pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 22,3% dipengaruhi variabel lain di luar variabel penerapan sistem manajemen informasi

objek pajak yaitu PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, jumlah luas lahan, dan jumlah penduduk. *(Mutia Amana Nastiti, Hadi Sasana)*